

PELATIHAN MITIGASI PRA BENCANA PADA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEHATAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN LANGSA LAMA**Emilda AS^{1*}, Magfirah², Asmanidar³, Anda Sayhputra⁴, Silfia Dewi⁵**^{1,2,5}Prodi D III Kebidanan Langsa Politeknik Kesehatan Aceh³Prodi D III Keperawatan Aceh Selatan Politeknik Kesehatan Aceh⁴Prodi D III Keperawatan Aceh Utara Politeknik Kesehatan Aceh

Email Korespondensi: emilda@poltekkesaceh.ac.id

Disubmit: 04 November 2022 Diterima: 17 November 2022 Diterbitkan: 01 Desember 2022
Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.8283>**ABSTRAK**

Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan wanita merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri wanita mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Upaya mengurangi risiko bencana yang sudah ada maupun mencegah terjadinya risiko baru dapat dilakukan dengan meningkatkan ketangguhan masyarakat. Masyarakat sebagai korban terdampak bencana memiliki risiko yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat risiko tersebut dapat dikurangi ataupun dicegah apabila ketangguhan telah terbentuk dalam diri masyarakat. Tujuan: kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan organisasi PKK dalam mitigasi bencana berbasis keluarga melalui pelatihan serta pendampingan. Metode: Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode pelatihan serta pendampingan yang dilanjutkan simulasi dengan sasaran anggota PKK yang ada di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, bulan Juni s/d Agustus 2022 dengan jumlah sasaran 32 orang. Hasil: adanya perbedaan nilai pengetahuan antara sebelum dan sesudah anggota PKK diberikan pelatihan serta pendampingan dengan kategori baik yaitu 40,6% menjadi 84,4%. Kesimpulan: Melalui kegiatan simulasi dalam pelatihan serta pendampingan pada organisasi PKK diharapkan para anggota PKK mengalami peningkatan pengetahuan serta dapat melakukan mitigasi bencana berbasis keluarga demi membentuk ketangguhan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pelatihan, Mitigasi, Bencana, PKK**ABSTRACT**

The role of Family Welfare Empowerment (PKK) in empowering women is all actions taken by PKK with the aim of increasing the abilities and potentials of women, so that women independently have the skills and expertise to deal with the problems they face independently through capacity building and quality life. Efforts to reduce existing disaster risks and prevent new risks can be carried out by increasing community resilience. Communities as victims

affected by disasters have risks that can be in the form of death, injury, illness, threatened life, loss of sense of security, displacement, damage or loss of property, and disruption of community activities. These risks can be reduced or prevented if resilience has been formed within the community. this service activity is to increase the knowledge and organizational capabilities of the PKK in family-based disaster mitigation through training and mentoring. Methods: Service activities are carried out by training and mentoring methods followed by simulation with the target of PKK members in Langsa Lama District, Langsa City, in June s /d August 2022 with a target number of 20 people. Results: there is a difference in the value of pre-test and post-test knowledge of the Youth Red Cross (PMR) with good categories, namely 55% to 85%. Conclusion: Through simulation activities in training and assistance to PKK organizations, it is hoped that PKK members will experience increased knowledge and be able to carry out family-based disaster mitigation in order to build resilience for the community.

Keywords: *Training, Mitigation, Disaster, PKK*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh sirkum pegunungan Pasifik dan Mediterania yang mempengaruhi kondisi topografi Indonesia. Selain itu Indonesia secara astronomis terletak pada garis katulistiwa yang mempengaruhi iklim dan cuaca seperti musim hujan dan kemarau. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terkena bencana yang menimbulkan kerugian baik korban jiwa, gangguan psikologis, dan kerusakan harta benda (National Disaster Management Agency of Republik Indonesia, 2011).

Kegawatdaruratan dan bencana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja, untuk itu perlu adanya sistem penanggulangan dalam meng hadapi kegawatdaruratan dan bencana secara terpadu. Kesiapan dalam sistem penanggulangan kegawat daruratan dan bencana dapat mempersingkat waktu tanggap dalam penanganan pasien dapat dilakukan secara cepat, tepat, cermat, dan sesuai dengan standar (Kurniatri, 2016).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana yang sudah ada dan yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang, bila tidak dikelola atau diminimalisasi, dapat mengakibatkan terjadinya kemunduran dari pembangunan yang sudah dilakukan. Maka dari itu arah kebijakan dalam penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana (2).Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dalam penanggulangan bencana, dimana Kementerian Kesehatan RI menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang didalamnya mencakup kegiatan penanggulangan krisis kesehatan. Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan (Kemenkes RI, 2016).

Dengan adanya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 maka program pengurangan risiko bencana secara memperkuat ketangguhan. Implementasi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 dilakukan berdasarkan empat prioritas aksi, yaitu 1) Memahami risiko bencana 2) Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko 3) Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana 4) Meningkatkan

kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif. Dengan adanya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 makaprogram pengurangan risiko bencana secara global akan mengacu pada kerangka tersebut, tidak terkecuali juga dengan Indonesia (Siregar & Wibowo, 2019).

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang besar membutuhkan manajemen bencana yang baik. Berdasarkan data statistik di Indonesia sampai dengan Juli 2017, korban jiwa mencapai 1.481 orang meninggal akibat bencana. Selama ini, manajemen bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-waktu saja, padahal kita hidup di wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta (Putra & Podo, 2017)

Upaya mengurangi risiko bencana yang sudah ada maupun mencegah terjadinya risiko baru dapat dilakukan dengan meningkatkan ketangguhan masyarakat. Masyarakat sebagai korban terdampak bencana memiliki risiko yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat risiko tersebut dapat dikurangi ataupun dicegah apabila ketangguhan telah terbentuk dalam diri masyarakat (Kemenkes RI, 2016).

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 359 per 100,000 kelahiran hidup, kondisi ini akan lebih buruk bila terjadi pada kondisi bencana, karena terganggunya sistem pelayanan kesehatan. Sampai saat ini data kasus kematian ibu pada daerah bencana belum terdokumentasi, sehingga data yang digunakan sebagai rujukan adalah AKI pada situasi normal. Di seluruh dunia, 15% sampai dengan 20% ibu hamil akan mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan. Sekitar 130 juta bayi di dunia lahir setiap tahun dan 4 juta diantaranya meninggal dunia dalam empat minggu pertama kehidupannya (periode neonatal) Angka Kematian Bayi (AKB) 32 per 1000 kelahiran hidup. Begitu juga dengan kasus - kasus kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan berbasis gender pada situasi bencana jarang dilaporkan, kasus (Kemenkes RI, 2015).

Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat. Dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan. Dalam Pasal 55 (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan meliputi: 1). Bayi, balita dan anak-anak; 2). Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3). Penyandang cacat; dan 4) Orang lanjut usia. Upaya perlindungan seharusnya diprioritaskan pada kelompok rentan tersebut, mulai dari penyelamatan, evakuasi, pengamanan sampai dengan pelayanan kesehatan dan psikososial (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008).

Pemerintah tidak akan mampu melakukan manajemen risiko bencana secara optimal tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen risiko bencana mutlak diperlukan karena masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari manajemen risiko bencana. Pasca bencana alam, masyarakatlah pelaku utama mitigasi dan masyarakat pula yang berpotensi menderita kerugian seandainya gempa bumi terjadi lagi. Optimalisasi peran pemerintah harus segera diwujudkan dalam kegiatan yang riil. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran masyarakat dapat dimulai dari proses pemahaman, pengembangan

kapasitas, menggabungkan kajian risiko, dan dukungan teknis (Susilowati & Siswanta, 2016).

Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga perlu melakukan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi kerugian akibat bencana. Kesiapsiagaan bencana dapat didefinisikan sebagai upaya yang memungkinkan pemerintah, organisasi, komunitas dan individu untuk merespon kejadian bencana secara cepat dan efektif (Dewi, 2010).

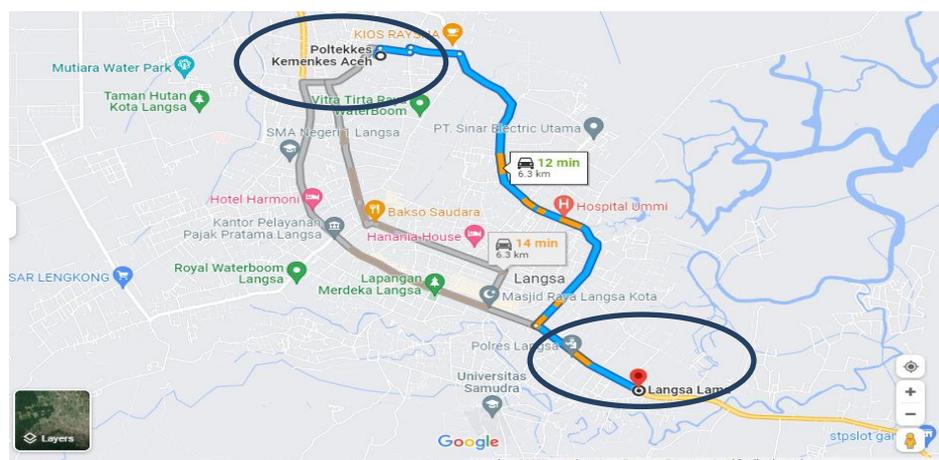
Terdapat beberapa hal pada kesiapan bencana diantaranya pengetahuan personal, komunitas yang berhubungan dengan mitigasi bencana dan ketentuannya. Hal lain yang diperlukan ialah pendidikan kebencanaan berupa sosialisasi, pelatihan, maupun melalui pendidikan formal, tanggap bencana, sistem peringatan dini bencana. Beberapa hal tersebut menjadi dasar pengetahuan terkait bencana yang perlu diketahui oleh individu dan komunitas (Rofifah, 2019).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara preventif untuk mengantisipasi dampak bencana yang terjadi, pemberdayaan tersebut dapat dimulai dari lembaga-lembaga masyarakat (Sarwidi H, 2018). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan wanita merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri wanita mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup (Hanis & Marzaman, 2020).

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Berdasarkan analisis situasi lingkungan, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain :

- a. Organisasi PKK Kecamatan Langsa Lama belum pernah mendapatkan pelatihan serta pendampingan mitigasi pra bencana berbasis keluarga.
- b. Memanfaatkan sumber daya masyarakat/komunitas yang ada di wilayah yaitu Organisasi PKK Kecamatan Langsa Lama.



Gambar 1 : Peta Lokasi Mitra

3. KAJIAN PUSTAKA

Bencana menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam (Soehatman Ramli, 2011). “Bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana”.

Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Nurromansyah & Setyono, 2014).

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa bencana merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terganggunya kehidupan manusia sehingga dapat merugikan baik secara material maupun non material. Pengertian diatas menjelaskan bahwa bencana dapat mengganggu kehidupan baik bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunungapi, bencana non alam alam seperti halnya gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan lain-lain.

Manajemen Bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana”. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen risiko bencana alam meliputi segala upaya untuk mencegah bahaya, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, dan mengurangi daya rusak dari bahaya yang tidak dapat dihindari (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008).

Mitigasi bencana merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, dan proses perencanaan untuk respon terhadap bencana yang betul-betul terjadi (Jahirin & Sunsun, 2021).

Keterlibatan peran perempuan terutama kaum ibu dalam mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan. Beberapa kejadian bencana dalam dekade terakhir terbukti peran perempuan lebih sering sebagai objek dalam manajemen risiko. Kaum perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki daya apa pun ketika terjadi bencana. Bahkan, sebagai objek manajemen risiko pun seringkali kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Pengelolaan bencana yang kebanyakan adalah laki-laki kurang memahami dan kurang memenuhi kebutuhan khususnya kaum perempuan. Rendahnya keterlibatan kaum perempuan karena ketersediaan akses untuk peningkatan kapasitasnya dalam penanggulangan risiko bencana masih terbatas (Susilowati & Siswanta, 2016).

PKK merupakan gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, serta mandiri. peningkatan kualitas perempuan ini juga melalui program mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan. Organisasi ini selanjutnya berubah menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga yang berupaya tidak hanya saja mendidik kaum perempuan, akan tetapi membina serta membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan sandang, papan kesehatan, serta mutu dan juga keluarga sejahtera (Hanis & Marzaman, 2020).

4. METODE

Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan melaksanakan program-program sebagai berikut :

- a. Persiapan pelaksanaan PKM Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 1) Mengurus perizinan kegiatan pengabdian masyarakat.
 - 2) Melakukan survei dan wawancara, Dinas Kesehatan Kota Langsa, Kecamatan Langsa Lamaterkait pendataan anggota PKK di wilayah Kecamatan Langsa Lama.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Langsa Lama.
- b. Pelatihan sekaligus pendampingan Anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Langsa Lama mitigasi bencana berbasis keluarga
 - 1) Melaksanakan pelatihan kepada Anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Langsa Lamamitigasi bencana berbasis keluarga.
 - 2) Pemateri diberikan oleh Tim Dosen, Tim BPBD Kota Langsa.
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut
- c. Pemantauan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
Pemantauan kinerja dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan setiap 2 minggu sekali selama 4 bulan setelah proposal dinyatakan lulus seleksi.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang mitigasi pra bencana berbasis keluarga dalam meningkatkan pengetahuan serta kemampuan Organisasi PKK dilaksanakan bulan Juni sampai dengan Agustus 2022.

Tabel 1. Data Demografi Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tentang Mitigasi Pra Bencana Berbasis Keluarga Pada Organisasi PKK di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2022

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	Usia (Tahun)		
	35-45	19	59,4
	≥ 46	13	40,6
2	Pendidikan Terakhir		
	SMP	2	6,2
	SMA	18	56,3

	D3	4	12,5
	D4/S1	8	25
3	Pekerjaan		
	Bekerja	11	34,4
	Tidak Bekerja	21	65,6

Berdasarkan data diatas karakteristik peserta kegiatan pengabdian masyarakat mayoritas usia $\geq 35-45$ tahun yaitu 59,4%. Pendidikan terakhir peserta mayoritas tingkat SMA/Sederajat yaitu 56,3%. Peserta kegiatan masyarakat yaitu mayoritas tidak bekerja yaitu 65,6%.

Tabel 2. Data Pengalaman Pelatihan/Seminar/Simulasi Bencana Yang Pernah Diikuti Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tentang Mitigasi Pra Bencana Berbasis Keluarga Pada Organisasi PKK di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2022

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	Pelatihan/Seminar		
	Pernah	6	18,8
	Belum pernah	26	81,2
2	Tahun Pelatihan/Seminar		
	Tahun 2022	0	0
	Sebelum tahun 2022	6	100
3	Simulasi Bencana		
	Pernah	6	18,8
	Belum pernah	26	81,2

Berdasarkan data diatas karakteristik peserta kegiatan pengabdian masyarakat mayoritas belum pernah mengikuti pelatihan/seminar tentang bencana yaitu 81,2%. Tahun peserta mengikuti pelatihan/seminar mayoritas sebelum tahun 2012 yaitu 100%. Mayoritas peserta belum pernah mengikuti simulasi bencana yaitu 81,2%.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Anggota PKK Sebagai Peserta Pelatihan Mitigasi Pra Bencana Berbasis Keluarga di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2022.

Kategori	Pengetahuan Mitigasi Pra Bencana			
	Pre Test		Post Test	
	f	%	f	%
Baik	13	40,6	27	84,4
Kurang	19	59,4	5	15,6
Jumlah	32	100	32	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai pre test dan post test pengetahuan mitigasi pra bencana pada anggota PKK dengan kategori baik yaitu 40,6% menjadi 84,4%.

b. Pembahasan

Berdasarkan evaluasi kegiatan pelatihan sebagai bentuk pengabdian yang sudah dilakukan tentang pengetahuan mitigasi pra bencana berbasis keluarga yang diberikan kepada anggota PKK antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan mengalami peningkatan. Peningkatan pengetahuan sesungguhnya tidak lepas dari pemberian pelatihan, sehingga tingkat pengetahuan menunjukkan adanya perubahan setelah diberikan pelatihan.

Pengetahuan adalah salah satu kekuatan yang dapat membentuk sejarah peradaban suatu bangsa dan bahkan kemajuan suatu masyarakat selalu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimiliki (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas/tingkat yang berbeda-beda (Siswanto et al., 2017).

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dan yang paling dirugikan selama terjadi bencana sejak itu juga beban mereka meningkat, kebutuhan perempuan jarang disediakan, kapasitas mereka seringkali diabaikan dan partisipasi mereka dalam bagian dari pembuat keputusan tidak diminta. Perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menikmati haknya secara penuh, pembatasan terhadap personal autotomi dan ekspresi politik, pembatasan literasi, pendidikan, kesempatan kerja dan training, keterbatasan kesehatan wanita, waktu dan keamanan diri merupakan faktor-faktor yang mengurangi kemampuan perempuan untuk mengantisipasi, siaga untuk bertahan hidup untuk merespon dan memulihkan diri dari bencana (Siregar & Wibowo, 2019).

Pengurangan risiko bencana pada perempuan dapat diupayakan dengan melibatkan peran perempuan dalam strategi pengurangan risiko bencana, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan yaitu : 1) Kesadaran perempuan dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya 2) Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki perempuan. 3) Kemampuan untuk menilai risiko yang dihati perempuan sebagai individu, anggota keluarga dan masyarakat. 4) Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan. 5) Kemampuan perempuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah. Penguatan peran perempuan sangat diperlukan ketika menghadapi bencana, mulai dari penguatan sosial, ekonomi, dan budaya (Hastuti, 2017). Peran perempuan perempuan dalam mitigasi bencana seharusnya ditingkatkan sehingga dapat menekan terjadinya kerentanan yang ditimbulkan akibat dari bencana seperti kelaparan, keterbatasan akses, kehilangan tempat tinggal, masalah kesehatan. Peran perempuan dapat difokuskan pada ketahanan pangan saat bencana, peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga tidak jatuh pada kondisi yang lebih miskin, dan mitigasi dampak bencana.

Pemerintah tidak akan mampu melakukan manajemen risiko bencana secara optimal tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen risiko bencana mutlak diperlukan karena masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari manajemen risiko bencana. Pasca bencana alam, masyarakatlah pelaku utama mitigasi dan masyarakat pula yang berpotensi menderita kerugian seandainya gempa bumi terjadi lagi. Optimalisasi peran pemerintah harus segera diwujudkan dalam kegiatan yang riil. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran masyarakat dapat dimulai dari proses pemahaman, pengembangan kapasitas, menggabungkan kajian risiko, dan dukungan teknis (Susilowati & Siswanta, 2016).

Dalam proses pemberdayaan maka perlu dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, antarlain melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan wanita merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri wanita mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup termasuk pemberian edukasi serta pelatihan mitigasi pra bencana berbasis keluarga (Harahap & Rizal, 2019).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi bencana adalah mitigasi bencana. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Salah satu bentuk mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran komunitas yang tinggal di kawasan rawan bencana (Dennis F. Niode et al., 2016).

Upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dilakukan dalam bentuk simulasi, masyarakat akan lebih mudah dan cepat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana juga merupakan salah satu langkah solusi dalam meningkatkan persiapan menghadapi bencana serta dapat mengurangi kemungkinan jumlah korban bencana (Badrujamaludin et al., 2021).

Upaya mengurangi risiko bencana yang sudah ada maupun mencegah terjadinya risiko baru dapat dilakukan dengan meningkatkan ketangguhan masyarakat. Masyarakat sebagai korban terdampak bencana memiliki risiko yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat risiko tersebut dapat dikurangi ataupun dicegah apabila ketangguhan telah terbentuk dalam diri masyarakat (Hanis & Marzaman, 2020).

Peran kelompok siaga bencana masyarakat sangat di butuhkan dalam penanganan bencana dan juga kerjasama diantara kelompok siaga bencana. Kondisi kegawatdaruratan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sudah menjadi tanggung jawab petugas kesehatan untuk menangani

masalah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kondisi kegawatdaruratan dapat terjadi pada daerah yang sulit dijangkau oleh petugas kesehatan. Sehingga pada kondisi tersebut peran serta masyarakat khususnya kader kesehatan untuk membantu korban sebelum ditangani oleh petugas kesehatan ahli menjadi sangat penting (Griffthi, 2019).



Gambar 1 : Penyuluhan Mitigasi Bencana Pada Organisasi PKK



Gambar 2 : Pemberian Materi dari Sekretaris BPBD Kota Langsa



Gambar 3 : Simulasi Mitigasi Bencana

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelatihan serta pendampingan ini dilakukan kepada anggota organisasi PKK di Kecamatan Langsa Lama oleh Tim Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh berupa peningkatan pengetahuan serta kemampuan organisasi PKK tentang mitigasi bencana berbasis keluarga melalui pembelajaran pemberian materi dan simulasi bencana mengingat banyaknya anggota organisasi PKK yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan. Kegiatan ini sangat bermanfaat dimana sumber daya masyarakat yaitu organisasi PKK mendapatkan pengetahuan yang harus dikembangkan sehingga bermanfaat bagi keluarga pada khususnya dan dapat disampaikan kepada masyarakat umum lainnya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). *Republik, Peraturan Pemerintah Penanggulangan, Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Definisi Bencana*. BNPB.
- Badrujamaludin, A., Ardiansyah, D., Apriany, D., Hastuti, D., Ropei, O., & Kumala, T. F. (2021). Kurangi Dampak Bencana Melalui Kematangan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Utama Kota Cimahi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 4(1), 122-128. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i1.3514>
- BNPB. (2018). *Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga*.
- Dennis F. Niode, Rindengan, Y. D. Y., & Karouw, S. D. S. (2016). Geographical Information System (GIS) Untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir Di Kota Manado. *Teknik Elektro Dan Komputer*, 5(2), 14-20.
- Dewi, R. N. W. (2010). *Kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010*. 1-167. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308218-T_31688-Kesiapsiagaan_sumber-full_text.pdf
- Griffthi, S. (2019). *Peran Serta Kelompok Siaga Bencana Terhadap Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Masyarakat Kelurahan Kalipancur*.
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.123-135.2019>
- Harahap, J., & Rizal, F. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 112. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i2.5827>
- Hastuti, H. (2017). Peran Perempuan Dalam Menghadapi Bencana Di Indonesia. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 14(2), 13-21. <https://doi.org/10.21831/gm.v14i2.13812>
- Jahirin, & Sunsun. (2021). Hubungan Pengetahuan Mitigasi Bencana dengan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir. *Healthy Journal*, 9(1), 19-26.
- Kemenkes RI. (2015). *Buku Pedoman: Paket Pelayanan Awal Minimum*

- (PPAM) Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan.
- Kemendes RI. (2016). *Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana*. Pusat Krisis Kesehatan.
- Kurniatri, D. M. (2016). *Analisis Upaya Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan Bencana Terhadap Korban Bencana di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Berdasarkan Metode Quality Function Deployment (QFD)*. 5(1), 56-62. <https://doi.org/10.18196/jmmr.5107>. Analisis
- National Disaster Management Agency of Republik Indonesia. (2011). *Regulation of the Head of National Disaster Management Agency of the Republic of Indonesia Number 3 Year 2011 on Standardization of Disaster Database*.
- Nurromansyah, A. N., & Setyono, J. S. (2014). Perubahan Kesiapsiagaan Masyarakat DAS Beringin Kota Semarang dalam Menghadapi Ancaman Banjir Bandang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 2(3), 231. <https://doi.org/10.14710/jwl.2.3.231-244>
- Putra, A. W. S., & Podo, Y. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana alam tanah longsor. *Urecol* 6th, 305-314. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1549>
- Rofifah, R. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Kesiapsiagaan Bencana Pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Diponegoro. *Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, 2019*, 1-124.
- Sarwidi H, M. (2018). Pendidikan Dan Pelatihan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat Dan Pemuda Karang Taruna Di Desa Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 168-197.
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Kelompok Rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30-38.
- Siswanto, Susila, & Suyanto. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif Kuantitatif Kedokteran & Kesehatan*. Boss Script.
- Soehatman Ramli. (2011). *Pedoman Prektis Manajemen Bencana (Disaster Management)* (Husjain Djajaningrat (ed.)). Dian Rakyat.
- Susilowati, F., & Siswanta, L. (2016). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Bencana Berbasis Gender. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 5(1), 41-49. <https://doi.org/10.20961/semar.v5i1.19850>